#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

LAPORAN KEUANGAN TA 2022 AUDITED

BALAI BESAR POM DI MAKASSAR

WBK
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
2022

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar adalah entitas akuntansi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Makassar, 02 Mei 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
Plt. Kepala Balai Besar POM
di Makassar,

Dra. Sriyani Rasyid, Apt
NIP. 196710051998032001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar POM di Makassar yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab Kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Makassar, 02 Mei 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
Plt. Kepala Balai Besar POM
di Makassar,

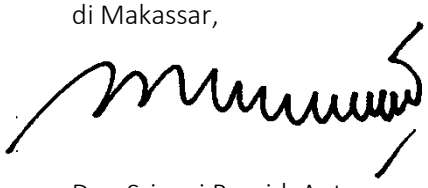

Dra. Sriyani Rasyid, Apt
NIP. 196710051998032001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan Balai Besar POM di Makassar Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Akuntansi.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada akhir tahun 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp855.358.722,00 atau 349,92% dari estimasi pendapatan sebesar Rp244.444.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada tahun 2022 adalah sebesar Rp53.605.935.082,00 atau 99,12% dari anggaran belanja sebesar Rp54.079.932.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp92.141.722.670,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp6.342.942.204,00. Aset Tetap (neto) sebesar Rp85.796.717.966,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.062.500,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas disajikan masing-masing Rp92.902.066,00 dan Rp92.048.820.604,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp692.962.496,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp51.261.548.052,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp50.568.585.556,00. Surplus/(Defisit) Kegiatan

Non Operasional sebesar Rp135.084.949,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp50.433.500.607,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp88.740.310.762,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp50.433.500.607,00 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.233.751,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp53.741.776.698,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp92.048.820.604

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas yang berakhir pada 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR POM DI MAKASSAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022			% thd Angg	2021
		ANGGARAN	REALISASI	Realisasi di Atas (Di Bawah)		REALISASI
PENDAPATAN	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	244.444.000	855.358.722	610.914.722	349,92	120.614.396
JUMLAH PENDAPATAN		**244.444.000**	**855.358.722**	**610.914.722**	**349,92**	**120.614.396**
BELANJA	B.2.					
Belanja Pegawai	B.3	20.040.000.000	19.680.877.443	(359.122.557)	98,21	18.380.594.838
Belanja Barang	B.4	24.020.497.000	23.931.035.467	(89.461.533)	99,63	17.942.879.845
Belanja Modal	B.5	10.019.435.000	9.994.022.172	(25.412.828)	99,75	6.456.998.302
JUMLAH BELANJA		**54.079.932.000**	**53.605.935.082**	**(473.996.918)**	**99,12**	**42.780.472.985**

Makassar, 02 Mei 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
Plt. Kepala Balai Besar POM
di Makassar,

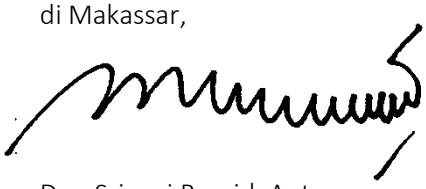

Dra. Sriyani Rasyid, Apt
NIP. 196710051998032001

II. NERACA

BALAI BESAR POM DI MAKASSAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR	**C.1**		
Belanja Dibayar di Muka	C.1.1	0	14.246.575
Persediaan	C.1.2	6.342.942.204	6.030.226.055
Jumlah Aset Lancar		6.342.942.204	6.044.472.630
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	37.457.820.000	37.331.820.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	89.432.103.947	78.850.137.195
Gedung dan Bangunan	C.2.3	20.545.394.998	20.335.419.932
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	463.074.700	475.088.950
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	309.830.100	309.830.100
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6	(62.411.505.779)	(54.551.118.669)
Jumlah Aset Tetap		85.796.717.966	82.751.177.508
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tidak Berwujud	C.3.1	5.500.000	5.500.000
Aset Lain-Lain	C.3.2	471.216.000	471.216.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(474.653.500)	(449.717.700)
Jumlah Aset Lainnya		2.062.500	26.998.300
JUMLAH ASET		**92.141.722.670**	**88.822.648.438**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**C.4**		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	92.902.066	82.337.676
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	C.4.2	92.902.066	82.337.676
JUMLAH KEWAJIBAN		92.902.066	82.337.676
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	92.048.820.604	88.740.310.762
JUMLAH EKUITAS		92.048.820.604	88.740.310.762
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**92.141.722.670**	**88.822.648.438**

Makassar, 02 Mei 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
Plt. Kepala Balai Besar POM
di Makassar,

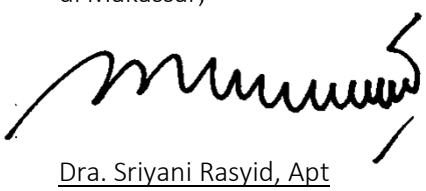

Dra. Sriyani Rasyid, Apt
NIP. 196710051998032001

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR POM DI MAKASSAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	692.962.496	4.394.960
JUMLAH PENDAPATAN		**692.962.496**	**4.394.960**
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	19.681.584.527	18.376.594.763
Beban Persediaan	D.3	2.553.912.527	3.177.482.744
Beban Barang dan Jasa	D.4	8.844.550.833	8.019.024.730
Beban Pemeliharaan	D.5	2.086.073.802	3.500.299.721
Beban Perjalanan Dinas	D.6	10.208.029.702	5.881.823.998
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	7.887.396.661	6.265.748.013
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	D.8		(146.150)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		**51.261.548.052**	**45.220.827.819**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(50.568.585.556)**	**(45.216.432.859)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		126.299.999	73.461.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	591.180.278
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		**126.299.999**	**(517.719.278)**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		43.018.707	22.477.781
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		34.233.757	72.341.082
Surplus /(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	**8.784.950**	**(49.863.301)**
SURPLUS /(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**135.084.949**	**(567.582.579)**
SURPLUS/(DEFISIT) LO		**(50.433.500.607)**	**(45.784.015.438)**

Makassar, 02 Mei 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
Plt. Kepala Balai Besar POM
di Makassar,

Dra. Sriyani Rasyid, Apt
NIP. 196710051998032001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR POM DI MAKASSAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	**88.740.310.762**	**90.084.653.698**
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(50.433.500.607)	(45.784.015.438)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3		
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	10.190.259
Koreksi atas Reklasifikasi	E.4.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.4	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.5	233.751	-
Koreksi Lain-lain	E.4.6	-	-
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI KUITAS		**233.751**	**10.190.259**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	**53.741.776.698**	**44.429.482.243**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		**3.308.509.842**	**(1.344.342.936)**
EKUITAS AKHIR	E.6	**92.048.820.604**	**88.740.310.762**

Makassar, 02 Mei 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
Plt. Kepala Balai Besar POM
di Makassar,

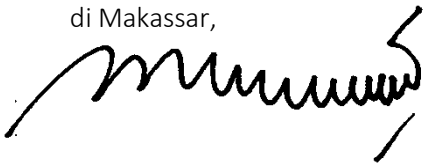

Dra. Sriyani Rasyid, Apt
NIP. 196710051998032001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan Kebijakan Teknis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BBPOM Makassar

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai:

Pasal 33

1. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
2. Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 34

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana: dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;

f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar sebagai berikut:

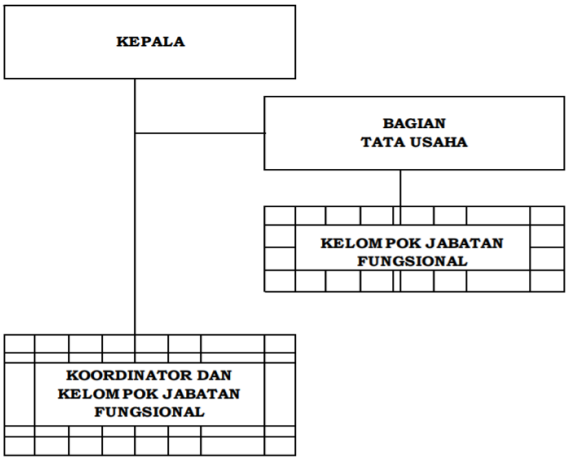

Renstra Balai Besar POM di Makassar memuat visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Balai Besar POM di Makassar untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan program prioritas Presiden.

Visi Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019-2024

Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

> ***"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."***

Misi Balai Besar POM di Makassar sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BBPOM Makassar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntaansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Balai Besar POM di Makassar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan {SAP) yang Pererintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan perubahannya.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar POM di Makassar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Badan POM. Di samping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Kepala Badan POM

Nomor 12 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut :

Pendapatan LRA

a) PENDAPATAN-LRA

a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

b) PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar adalah sebagai berikut :

- Pendapatan jasa pengawasan obat dan makanan diakui setelah pengawasan selesai dilaksanakan
- Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin diakui setelah peralatan dan mesin telah terjual
- Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

3. BELANJA

a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
c. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan program akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. BEBAN

a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi asset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

b. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis helanja dan selanjutnya klasifikasi herdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas LaporanKeuangan

Aset

5. ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. ASET LANCAR

1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

2) Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
   a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
   b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

3) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang ditentukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	U r ai a n	Penyisihan
Lancar	*Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo*	*0.5%*
Kurang Lancar	*Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan*	*10%*
Diragukan	*Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan*	*50%*
Macet	• *Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan* • *Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/ DJKN*	*100%*

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

4) Persediaan merupakan aset yang berupa:
   a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
      (1) Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan (leaflet, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pembanding, Hewan Percobaan;
      (2) Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (*Glassware*) dan;
      (3) Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
   b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan

dalam proses produksi, contoh : bahan baku untuk pembuatan baku pembanding.

c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat, contoh : baku pembanding yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan.

d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Sesuai dengan Perka Badan POM No. 12 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dikecualikan sebagai Persediaan berupa Arsip Sampel di Lingkungan Badan POM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (*retain sample*). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial.

5) Persediaan disajikan sebesar :

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi:

(1) Harga pembelian

(2) Biaya pengangkutan

(3) Biaya penanganan

(4) Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada

perolehan persediaan termasuk pajak.

Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:

(1) Potongan harga
(2) Rabat dan lainnya yang serupa.
(3) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis.

b) Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh Badan POM, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 05 Akuntansi Persediaan.

6) Persediaan alat gelas laboratorium adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, plastik atau bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan laboratorium. Alat gelas yang diakui sebagai persediaan meliputi:
   a) Alat gelas berupa alat ukur kuantitatif diantaranya:
      (1) Alat gelas yang masih ada di gudang
      (2) Alat gelas di laboratorim yang belum digunakan
      (3) Alat gelas di laboratorium yang sudah digunakan dan masih dalam keadaan baik.
   b) Alat gelas berupa alat ukur kualitatif diantaranya:
      (1) Alat gelas yang masih ada di gudang,
      (2) Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan

7) Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
   a) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
   b) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
   c) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila

diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satujuta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah];
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), a tau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

6. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah
  - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	*2 s.d. 20 tahun*
Gedung dan Bangunan	*10 s.d. 50 tahun*
Jalan, Jaringan dan Irigasi	*5 s.d 40 tahun*
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	*4 tahun*

Piutang Jangka Panjang

7. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

8. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Di Badan POM Amortisasi yang ada yaitu Software Komputer deangan masa manfaat selama 4 tahun.
- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

9. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

  Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- Kewajiban Jangka Panjang

  Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, sesuai dengan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 09 Akuntansi Kewajiban.

Ekuitas

10. Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Capaian Output

11. Capaian Output Strategis

Selama Tahun Anggaran 2022, Output yang telah dicapai oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar sebagai berikut:

Tabel 4

Rincian Capaian Output TA 2022

No	Kode Output	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progress Capaian Output
1	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	2.432.878.000	2.399.429.349	98,63%	1	1	100,00%
2	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh BBPOM	190.156.000	189.958.641	99,90%	14	14	100,00%
3	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	448.828.000	427.621.398	95,28%	450	510	100,00%
4	3165.BDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh BB/BPOM	108.944.000	103.554.000	95,05%	29	29	100,00%
5	3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	6.422.550.000	6.420.254.860	99,96%	21.700	22.336	100,00%
6	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1.326.065.000	1.304.743.446	98,39%	1	1	100,00%
7	3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	87.500.000	86.372.999	98,71%	38	40	99,99%
8	3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	9.278.072.000	9.254.386.652	99,74%	1	1	100,00%
9	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	433.143.000	432.038.300	99,74%	1	1	100,00%
10	3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	184.100.000	142.689.600	77,51%	1	1	100,00%
11	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	124.120.000	123.427.020	99,44%	1	1	100,00%
12	3165.QCD.U44	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM	807.000.000	783.605.293	97,10%	10	10	100,00%
13	3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	780.534.000	780.526.560	100,00%	68	68	100,00%
14	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	954.058.000	954.051.495	100,00%	19	19	100,00%
15	3165.QDB.003	Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	552.421.000	552.417.710	100,00%	13	13	100,00%
16	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	857.458.000	850.697.926	99,21%	776	779	100,00%
17	3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	1.021.109.000	997.652.624	97,70%	1648	1756	100,00%
18	3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	50.912.000	50.610.328	99,41%	98	100	100,00%
19	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksaoleh BB/BPOM	488.762.000	458.678.801	93,85%	200	200	100,00%
20	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	1.662.227.000	1.636.624.993	98,46%	1200	1259	100,00%
21	3165.EBA.962	Layanan Umum	711.552.000	696.290.024	97,86%	1	1	100,00%
22	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran UPT	25.157.543.000	24.672.883.608	98,07%	1	1	100,00%

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Balai Besar POM di Makassar memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp56.353.243.000,00 Selama periode tahun 2022 Balai Besar POM di Makassar telah melakukan revisi terhadap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Tahun sebanyak 11 (sebelas) kali perubahan. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut sebagai berikut :

1. DIPA Revisi ke-1 tanggal 16 Desember 2021 dilakukan pemblokiran mandiri dalam rangka pencadangan anggaran (Automatic Adjusment) TA 2022
2. DIPA Revisi ke-2 tanggal 15 Februari 2022 dilakukan revisi dalam rangka adanya pergeseran anggaran dalam satu KRO serta pemutakhiran data berkaitan dengan revisi POK.
3. DIPA Revisi ke-3 tanggal 17 April 2022 dilakukan revisi dalam rangka adanya pergeseran anggaran dalam satu KRO serta pemutakhiran data berkaitan dengan revisi POK.
4. DIPA Revisi Ke-4 tanggal 14 Mei 2022 dilakukan revisi dalam rangka adanya pergeseran anggaran dalam satu KRO dan Pemutakhiran data berkaitan dengan revisi POK termasuk yang mengakibatkan perubahan halaman III DIPA.
5. DIPA Revisi Ke-5 tanggal 09 Juni 2022 dilakukan revisi dalam rangka Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) Tahap II BPOM TA 2022.
6. DIPA Revisi Ke-6 tanggal 18 Juli 2022 dilakukan revisi dalam rangka adanya pergeseran anggaran dalam satu KRO dan Pemutakhiran data berkaitan dengan revisi POK termasuk yang mengakibatkan perubahan halaman III DIPA.
7. DIPA Revisi Ke-7 tanggal 22 Agustus 2022 dilakukan revisi dalam rangka revisi pemenuhan belanja pegawai TA 2022.
8. DIPA Revisi Ke-8 tanggal 10 Oktober 2022 dilakukan revisi dalam rangka Realokasi dan Optimalisasi Anggaran guna Meningkatkan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program KIE Obat dan Makanan
9. DIPA Revisi Ke-9 tanggal 17 Oktober 2022 dilakukan dalam rangka update ADK dan RPD Triwulan IV tahun 2022 yang disahkan di Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan.

10. DIPA Revisi Ke-10 tanggal 02 November 2022 dalam rangka pemanfaatan Automatic Adjustment TA 2022 terkait pengawalan terhadap target Prioritas Nasional (PN) melalui mekanisme revisi buka blokir.
11. DIPA Revisi Ke-11 tanggal 04 Desember 2022 dalam rangka Pemutakhiran ADK dan POK akhir.

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Rincian Perubahan DIPA TA 2022

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan			
Pendapatan PNBP	244.444.000	244.444.000	0
Jumlah Pendapatan	**244.444.000**	**244.444.000**	**0**
Belanja			
Belanja Pegawai	18.475.911.000	20.040.000.000	1.564.089.000
Belanja Barang	25.777.369.000	24.020.497.000	(1.756.872.000)
Belanja Modal	12.099.963.000	10.019.435.000	(2.080.528.000)
Jumlah Belanja	**56.353.243.000**	**54.079.932.000**	**(2.273.311.000)**

Realisasi Pendapatan Rp855.358.722,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp855.358.722,00 atau mencapai 349,92% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp244.444.000,00 Pendapatan Balai Besar POM di Makassar terdiri dari Pendapatan dari Pendapatan Kesehatan dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2022
(Dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	244.444.000	671.475.000	275%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	126.299.999	100%
Pendapatan Denda	-	8.246.774	100%
Pendapatan Lain-Lain	-	49.336.949	100%
Jumlah	**244.444.000**	**855.358.722**	**349,92%**

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 709,17% dibandingkan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan baru terkait pengakuan PNBP Fungsional Jasa Pengawasan Obat dan Makanan yang sebelumnya diakui secara terpusat namun pada tahun 2022 diakui oleh Unit Pelaksana Teknis Balai. Berikut perbandingan realisasi pendapatan TA 2022 dan 2021.

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021
(Dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	671.475.000	-	100,00%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	126.299.999	73.461.000	171,93%
Pendapatan Denda	21.487.496	4.394.960	488,91%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	10.978.343	13.528.436	100,00%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	3.391.000	-	100,00%
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	21.726.884	-	100,00%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	29.230.000	0,00%
Jumlah	**855.358.722**	**120.614.396**	**709,17%**

Rincian Realisasi Pendapatan berupa :

- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp671.475.000,00 data rincian terlampir pada Lampiran 1 Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan.
- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp126.299.999,00 berasal dari lelang kendaraan bermotor dengan No. NTPN 058B63CIF28BN6RR tanggal setor 19 Desember 2022 dengan Risalah Lelang No. RL-1337/72/2022

- Pendapatan Denda senilai Rp21.487.496,00 terdiri dari:

No	Uraian	No. NTPN/SP2D	Tanggal Setor	Nilai
1	Denda Keterlambatan Pengadaan BSL 2 (Temuan AO)	27A852G4V714OUDS	24-Mei-22	13.240.722
2	Denda Keterlambatan pengadaan Baju Dinas	221361301011505	20-Jul-22	120.870
3	Denda Keterlambatan pengadaan Perlengkapan Peserta Kegiatan KIE	221361302008154	27-Jul-22	874.500
4	Denda Keterlambatan pengadaan Perlengkapan Peserta Kegiatan KIE	221361302008314	01-Agu-22	4.164.144
5	Denda Keterlambatan pengadaan Baju Dinas	221361301015217	14-Sep-22	2.826.620
6	Denda Keterlambatan Pengadaan Reagen dan Media Mikro	221361302014821	06-Des-22	260.640
	Total Pendapatan			**21.487.496**

- Pendapatan atas Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp.10.978.343,00 terdiri dari:

No	Uraian	No. NTPN	Tanggal Setor	Nilai
1	Pengembalian Tukin dan Uang Makan Bulan Desember 2021	E5AAC2G4V6TKUBVM	04-Apr-22	9.180.394
2	Pengembalian Tukin Okt s.d Des 2021	F31BA55DEMO8SCJL	19-Mei-22	1.623.699
3	Pengembalian Uang Makan hasil Audit Operasional inspektorat	E98D81JNFCERCP6F	23-Mei-22	174.250
	Total Pendapatan			**10.978.343**

- Pendapatan yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp3.391.000,00 yang terdiri atas:

No	Uraian	No. NTPN	Tanggal Setor	Nilai
1	Pengembalin Belanja Perjalanan Dinas	8BC8B7QLU6FE3ABS	19-Mei-22	906.000
2	Pengembalian honor penguji Covid-19	7D1187QLU6FF63IC	23-Mei-22	2.465.000
3	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas	AAC0455DEN40U15V	13-Sep-22	20.000
	Total Pendapatan			**3.391.000**

- Pendapatan yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp21.726.884,00 yang terdiri atas:

No	Uraian	No. NTPN	Tanggal Setor	Nilai
1	Pengembalian belanja modal atas temuan AO berupa lebih bayar pengadaan jaringan listrik	9CC297QLU6FF6T8S	23-Mei-22	8.954.000
		184980N9VIE5QNQ0	17-Nov-22	3.060.250
2	Temuan AO 2022 (Kelebihan Bayar Konstruksii Renovasi BSL 2 CV. Berkah Amanah	DDC382G4V7781Q3M	28-Jul-22	9.712.634
	Total Pendapatan			**21.726.884**

Realisasi Belanja Rp53.605.935.082,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja TA 2022 adalah sebesar Rp53.605.935.082,00 atau 99,12% dari anggaran belanja sebesar Rp54.079.932.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

NO	Uraian	2022		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Pegawai	20.040.000.000	19.680.877.443	98,21%
2	Belanja Barang	24.020.497.000	23.931.035.467	99,63%
3	Belanja Modal	10.019.435.000	9.994.022.172	99,75%
	Total Belanja Kotor	**54.079.932.000**	**53.605.935.082**	**99,12%**
	Pengembalian		(3.327.888)	
	Total Belanja Bersih	**54.079.932.000**	**53.602.607.194**	**99,12%**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

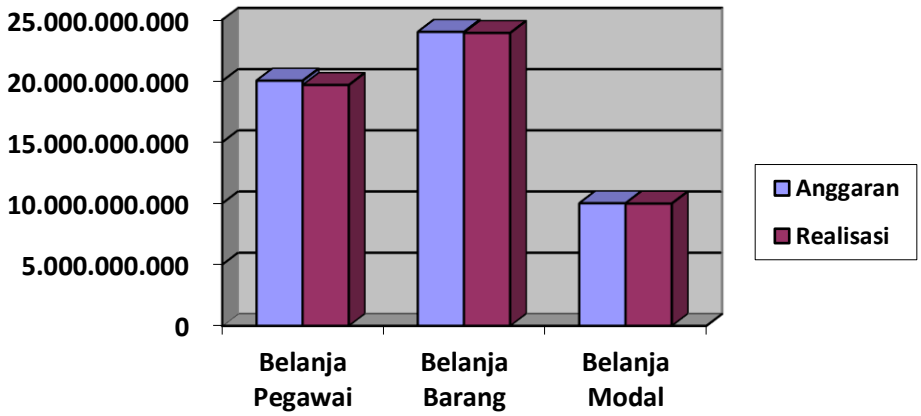

Dibandingkan dengan 31 Desember 2021, Realisasi Belanja 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 25,30%. Peningkatan persentase kenaikan terbesar terjadi pada belanja modal yang mencapai 54,78% lalu diikuti peningkatan pada belanja barang mencapai 33,37%.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	19.680.877.443	18.380.594.838	7,07%
Belanja Barang	23.931.035.467	17.942.879.845	33,37%
Belanja Modal	9.994.022.172	6.456.998.302	54,78%
Jumlah	**53.605.935.082**	**42.780.472.985**	**25,30%**

Realisasi Belanja Pegawai Rp19.680.877.443,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp19.680.877.443,00 dan Rp18.380.594.838,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan per aturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	9.201.558.768	9.305.864.260	-1,12%
Belanja Lembur	55.393.000	62.068.000	-10,75%
Belanja Tunjangan Khusus	10.425.036.063	9.022.348.782	15,55%
Jumlah Belanja Kotor	**19.681.987.831**	**18.390.281.042**	**7,02%**
Pengembalian Belanja Pegawai	(1.110.288)	(9.686.204)	-88,54%
Jumlah Belanja	**19.680.877.543**	**18.380.594.838**	**7,07%**

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 7,07% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021. Peningkatan belanja pegawai tersebut diantaranya karena adanya kebijakan pembayaran belanja THR Tukin sebesar 50% dimana pada tahun sebelumnya THR Tukin tidak dibayarkan.

Pengembalian belanja pegawai Balai Besar POM di Makassar selama periode 1 Januari – 31 Desember 2022 sebesar Rp1.110.288 dengan No. SP2D 221361302006227 tanggal 16 Juni 2022 atas pembayaran kekurangan gaji berupa tunjangan fungsional pegawai yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional PFM dimana pada belanja tersebut terjadi pengembalian atas pembayaran tunjangan umum yang telah dibayarkan sebelumnya.

Realisasi Belanja Barang Rp23.931.035.467,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp23.931.035.467,00 dan Rp17.942.879.845,00. Adapun rincian belanja barang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 11
Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.619.998.573	2.379.152.987	10,12%
Belanja Barang Non Operasional	3.026.146.063	2.765.149.852	9,44%
Belanja Barang Persediaan dan Barang Konsumsi	2.816.932.107	2.092.966.616	34,59%
Belanja Jasa	3.173.269.816	2.868.342.752	10,63%
Belanja Pemeliharaan	2.087.466.706	1.955.847.390	6,73%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	10.209.439.702	5.903.035.406	72,95%
Jumlah Belanja Kotor	**23.933.252.967**	**17.964.495.003**	**33,23%**
Pengembalian Belanja	(2.217.500)	(21.615.158)	-89,74%
Jumlah Belanja	**23.931.035.467**	**17.942.879.845**	**33,37%**

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 mengalami peningkatan 33,37% terhadap Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021. Peningkatan belanja secara signifikan terjadi pada belanja perjalanan dinas dalam negeri akibat sudah adanya kebijakan pemerintah atas pelonggaran protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan antar daerah di Indonesia dalam masa pandemi covid-19.

Pengembalian belanja Barang Balai Besar POM di Makassar selama periode 1 Januari – 31 Desember 2022 sebesar Rp2.217.500,00 antara lain:

No	Uraian	No. NTPN	Tanggal Setor	Nilai
1	Pengemb. Belanja Honor Output Kegiatan	E990545IPSDBTMF6	06-Apr-22	807.500
2	Pengemb. Perjadin Paket Meeting DK	A330C5UDPHI7076A	22-Jul-22	1.410.000
Total Pendapatan				**2.217.500**

Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19

Selama tahun 2022 terdapat belanja barang dalam rangka penangangan pandemi Covid-19 sebesar Rp438.192.378,00 dari anggaran belanja barang yang dialokasikan sebesar Rp439.324.000,00 yang dikhususkan untuk belanja

penanganan selama masa pandemi diantaranya pembelian masker, hand sanitizer, pemeriksaan swab untuk pegawai yang akan bertugas keluar daerah dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12
Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19
Per 31 Desember 2022

Kode Output	Kode Komponen	Kode Sub Komponen	Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan (%)	Keterangan
3165.PDD Standarisasi Lembaga	051. Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	U BELANJA JASA UNTUK RAPID TEST DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	6.045.000	6.044.000	99,98%	Jasa Rapid Antigen / PCR Test
	052 Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A OPERASIONAL DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	25.532.000	24.700.000	96,74%	Honor Penguji Covid
3165.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	051 Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat	B PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MELALUI KIE OBAT DAN MAKANAN	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	134.865.000	134.865.000	100,00%	Paket APD
3165.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	053 Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	D Penambah Daya Tahan Tubuh/Penanganan Pandemi Covid	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	21.660.000	21.649.704	99,95%	PDTT
	055 Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	XH PENGAWALAN FARMAKOGIVILANCE VAKSIN COVID-19	524115	Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	450.000	450.000	100,00%	Transport
		XK Pemeriksaan rapid Antigen	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	100.000	100.000	100,00%	Jasa Rapid Antigen / PCR Test
		XO Penambah Daya Tahan Tubuh/Penanganan Pandemi Covid	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	58.591.000	58.570.465	99,96%	PDTT
3165.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 Layanan Umum	E OPERASIONAL PERKANTORAN	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	58.140.000	57.964.950	99,70%	APD
			521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	23.310.000	23.310.000	100,00%	Reagen
			522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	505.000	505.000	100,00%	Jasa Rapid Antigen / PCR Test
			524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	1.350.000	1.350.000	100,00%	Transport
		S PEMUSNAHAN LIMBAH COVID	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	10.000.000	9.933.390	99,33%	Pemusnahan Limbah Covid
3165.AEA Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	G. Penambah Daya Tahan Tubuh/Penanganan Pandemi Covid	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	39.984.000	39.982.186	100,00%	PDTT
3165.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	051 Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat	H Penyebaran Informasi melalui Car Free Day	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.400.000	1.399.770	99,98%	Masker
6384 EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 Layanan Perkantoran	U PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	17.682.000	17.681.957	100,00%	Vitamin
6384 EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 Layanan Perkantoran	W Penambah Daya Tahan Tubuh/Penanganan Pandemi Covid	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	39.710.000	39.685.956	99,94%	Vitamin
JUMLAH					**439.324.000**	**438.192.378**	**100%**	

Belanja Modal Rp9.994.022.172,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.994.022.172,00 dan Rp6.456.998.302,00 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	126.000.000		100,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.833.334.472	6.001.670.377	63,84%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.687.700	378.569.650	-90,84%
Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan	0	76.758.275	-100,00%
Jumlah Belanja Kotor	**9.994.022.172**	**6.456.998.302**	54,78%
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**9.994.022.172**	**6.456.998.302**	**54,78%**

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2022 mengalami kenaikan yakni sebesar 54,78% dibandingkan pada 31 Desember 2021. Peningkatan belanja terjadi pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa pengadaan Alat Laboratorium untuk menunjang Tugas dan Fungsi pengawasan Obat dan Makanan.

Belanja Modal Tanah Rp126.000.000,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp126.000.000,00 dan Rp0,00. Realisasi tersebut pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan adanya pekerjaan fisik berupa pematangang lahan dan perataan lahan kantor.

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	126.000.000		100,00%
Jumlah Belanja Kotor	126.000.000	0	100,00%
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	126.000.000	0	100,00%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp9.833.334.472,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp9.833.334.472,00, mengalami kenaikan sebesar 63,84% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp6.001.670.377,00. Hal ini disebabkan oleh pengadaan peralatan dan mesin sebagai fasilitas pendukung untuk

kegiatan operasional sehari-hari perkantoran. Adapun rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut sebagai berikut:

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	Naik (Turun) %
Alat Laboratorium	9.277.869.152	4.121.813.449	125,09%
Alat Pengolah Data	123.427.020	227.676.100	-45,79%
Peralatan & Fasilitas Perkantoran	136.269.300	1.547.352.384	-91,19%
Alat Studio dan Komunikasi	0	80.654.672	-100,00%
Alat Kodekteran	0	21.577.772	-100,00%
Peralatan Olahraga	0	2.596.000	-100,00%
Alat Angkutan Darat Bermotor	295.769.000	0	100,00%
Jumlah Belanja Kotor	**9.833.334.472**	**6.001.670.377**	**63,84%**
Pengembalian Belanja Modal	**-**	**-**	**-**
Jumlah Belanja Modal	**9.833.334.472**	**6.001.670.377**	**63,84%**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp34.687.700,00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp34.687.700,00 dan Rp143.140.000,00. Realisasi belanja modal TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 24,23% dibandingkan realisasi TA 2021. Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa biaya perencanaan Rehab Gedung Kantor beserta transport perjalanan dinas pengelolaan kegiatan rehab gedung di kantor Balai Besar POM di Makassar.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	1.305.000	-100,00%
Belanja Penambahan Nilai Gedung	34.687.700	141.835.000	100,00%
Jumlah Belanja Kotor	**34.687.700**	**143.140.000**	**24,23%**
Pengembalian Belanja Modal	**-**	**-**	**-**
Jumlah Belanja Modal	**34.687.700**	**143.140.000**	**24,23%**

C. MENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset lancar Rp6.342.942.204,00

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp6.342.942.204,00 dan Rp6.044.472.630,00.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera di direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Belanja Dibayar di Muka Rp0,00

C.1.1 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp14.246.575,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja dibayar dimuka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 17
Rincian Belanja dibayar dimuka
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021
Belanja dibayar di muka	-	14.246.575
Jumlah Belanja	**-**	**14.246.575**

Persediaan Rp6.342.942.204,00

C.1.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp6.342.942.204,00 dan Rp6.030.226.055,00. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021

Jenis	2022	2021
Barang Konsumsi	861.142.986	939.465.125
Barang untuk Pemeliharaan	8.868.983	13.360.450
Suku Cadang	2.012.552.043	1.913.234.303
Bahan Baku	3.460.378.192	3.164.166.177
Jumlah	**6.342.942.204**	**6.030.226.055**

Dari saldo Persediaan diatas sampai per 31 Desember 2022 terdapat Transfer Masuk dari PPOMN dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Entitas Pengirim	No. BAST	Tanggal	Total
Bahan Baku	PPPOMN	PP.03.02.10.105.03.22.110B	01-Jul-22	1.151.372
Bahan Baku	PPPOMN	PP.03.02.10.105.03.22.110A	01-Jul-22	17.397.720
Bahan Baku	PPPOMN	T-PP.05.02.10.104.07.22.044A	02-Jul-22	4.485.654
Bahan Baku	PPPOMN	PP.03.02.10.105.07.22.190A	02-Jul-22	10.206.991
Bahan Baku	PPPOMN	T-PP.05.02.10.104.07.22.213A	01-Agu-22	2.879.726
Bahan Baku	PPPOMN	PP.03.02.10.105.08.22.256A	05-Agu-22	5.421.901
Bahan Baku	PPPOMN	PP.03.02.10.105.08.22.270A	18-Agu-22	114.322
Bahan Baku	PPPOMN	PP.03.02.10.105.09.22.309A	19-Sep-22	3.467.199
Bahan Baku	PPPOMN	PP.03.02.10.105.10.22.330A	03-Okt-22	1.320.872
Bahan Baku	PPPOMN	PP.03.02.10.105.10.22.352A	11-Okt-22	3.964.787
Bahan Baku	PPPOMN	PP.03.02.10.105.10.22.367A	26-Okt-22	4.931.221
Bahan Baku	PPPOMN	T-PP.05.02.10.104.12.22.405A	08-Des-22	1.874.101
Bahan Baku	PPPOMN	PP.03.02.10.105.12.22.426	23-Des-22	352.192
Jumlah				**57.568.058**

Dari saldo Persediaan diatas tersebut terdapat persediaan dalam kondisi usang senilai Rp29.442.425,00, (adapun rinciannya terdapat pada Lampiran 2).

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai, pada tanggal 31 Desember 2022 tidak terdapat persediaan terkait penanganan Covid-19.

Aset Tetap Rp85.796.717.966,00

C.2 Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp85.796.717.966,00 dan Rp82.751.177.508,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan opreasional entitas. Aset Tetap pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah Rp37.457.820.000,00

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Besar POM di Makassar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp37.457.820.000,00 dan Rp37.331.820.000. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Mutasi Tanah per 31 Desember 2022
Dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**37.331.820.000**
Mutasi Tambah:	252.000.000
Pembelian	126.000.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	126.000.000
Mutasi Kurang:	(126.000.000)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(126.000.000)
Saldo per 31 Desember 2022	**37.457.820.000**
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**37.457.820.000**

Mutasi tambah atas Tanah pada awalnya dicatat sebagai pembelian senilai Rp126.000.000,00 lalu dikoreksi menjadi pengembangan nilai aset. Pengembangan nilai aset tersebut berupa pekerjaan penimbunan dan perataan lahan tanah kantor sesuai surat Keterangan No. PL.03.09.26A.26A5.07.22.356, tanggal 29 Juni 2022.

Tanah seluas 9.662 m2 terletak di Jln. Baji Minasa No. 2 Makassar Propinsi Sulawesi Selatan dengan Sertifikat Hak Pakai No. 20001 a.n. Pemerintah RI Cq. Badan POM RI.

Peralatan dan Mesin Rp89.432.103.947,00

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp89.432.103.947,00 dan Rp78.850.137.195,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 20
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin TA 2022

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**78.850.137.195**
Mutasi tambah:	**12.560.672.742**
Pembelian	3.652.225.362
Hibah Masuk	748.632.280
Pengembangan Melalui KDP	789.172.990
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	6.179.269.110
Reklasifikasi Masuk	1.189.574.000
Koreksi Pencatatan Tambah	1.799.000
Mutasi kurang:	**-1.978.705.990**
Koreksi Pencatatan	(789.131.990)
Reklasifikasi Keluar	(1.189.574.000)
Saldo per 31 Desember 2022	**89.432.103.947**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(59.642.784.692)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**29.789.319.255**

Mutasi tambah peralatan dan mesin sebagai berikut:

1. Pembelian Peralatan dan Mesin senilai Rp3.652.225.362,00 berupa:

No	Uraian	No. SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Keterangan
1	Toyota Rush	221361302000491	08-02-2022	295.769.000	PT Hadji Kalla
2	Kursi	221361302001586	10-03-2022	15.885.000	
3	Stabilisator	221361302002320	25-03-2022	12.617.500	
4	Scanner	221361302002556	31-03-2022	12.850.000	
5	Laptop	221361302002556	31-03-2022	63.750.000	
6	Meja Kerja Kayu	221361302003227	13-04-2022	17.360.800	
7	CO2 Analyzer	221361302004999	25-05-2022	34.145.265	
8	Meja Dorong Saji	221361302004669	18-05-2022	2.203.000	
9	Cold Storage	221361302004669	18-05-2022	14.716.000	
10	Software untuk Laptop	221361302004669	18-05-2022	1.799.000	
11	AC Split	221361302004669	18-05-2022	24.315.000	
12	Kursi Besi	221361302004669	18-05-2022	5.318.000	
13	Meja Dorong Saji	221361302004669	18-05-2022	3.250.000	
14	Printer	221361302004998	25-05-2022	3.630.000	HnD
15	Laptop	221361302004998	25-05-2022	14.057.010	HnD
16	Printer	221361302004998	25-05-2022	10.452.000	HnD
17	Printer	221361302004998	25-05-2022	5.865.000	HnD
18	AC Split	221361302006475	23-06-2022	4.800.000	
19	AC Split	221361302006475	23-06-2022	8.050.000	
20	HPLC		01-07-2022	569.222.430	
21	Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)		01-07-2022	12.485.280	
22	Detector HPLC		01-07-2022	82.082.280	
23	Up Right Chiller/Frezzer		01-07-2022	123.543.000	
24	Access Point	221361302007016	04-07-2022	14.725.000	HnD
25	PC Unit	221361302009384	24-08-2022	15.960.000	
26	Printer	221361302009384	24-08-2022	1.800.000	
27	HPLC	221361302009384	24-08-2022	1.299.235.098	
28	UPS	221361302009384	24-08-2022	43.054.125	
29	Laptop	221361302009386	24-08-2022	9.899.010	
30	Micro Analytical Balance	221361302010271	12-09-2022	607.840.566	
31	Incubator	221361303007306	12-09-2022	81.449.000	
32	Filing Cabinet Besi	221361302010969	28-09-2022	1.279.000	
33	Printer		25-OCT-22	26.142.998	
34	Router		03-11-2022	11.750.000	
35	Hard Disk		30-11-2022	1.125.000	
36	Micro Pippettes		05-DEC-22	18.870.000	
37	Incubator		15-DEC-22	180.930.000	
	Total Pembelian			3.652.225.362	

2. Hibah Masuk Peralatan dan Mesin berupa Multi Unit Extraction yang berasal dari JICA senilai Rp748.632.280,00 dengan BAST No. NPB/024/JICA-BPOM/2022 tanggal 04 Maret 2022.
3. Pengembangan melalui KDP berupa aksesoris alat lab (Detector HPLC) senilai Rp 789.172.990,00
4. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP senilai Rp6.179.269.110,00 berupa alat laboratorium berdasarkan surat keterangan Kepala Balai Nomor PL.03.01.26A.26A5.09.22.421
5. Reklasifikasi Masuk senilai Rp1.189.574.000,00 berupa perubahan status pencatatan mobil lab keliling yang semula dicatat sebagai kendaraan operasional menjadi kendaraan fungsional dengan Surat Keterangan No.PL.03.01.26A.26A5.09.22.421 tanggal 1 September 2022
6. Koreksi pencatatan tambah senilai Rp1.799.000,00 berupa pengembangan nilai laptop berbentuk *software office Macbook*.

Mutasi kurang peralatan dan mesin sebagai berikut:

1. Koreksi pencatatan senilai Rp789.131.990 atas kesalahan pencatatan pada modul komitmen sakti, dimana seharusnya dicatat sebagai pengembangan melalui KDP namun dicatat sebagai pembelian sesuai surat PL.03.10.26A.26A5.10.22.445 tanggal 27 September 2022.
2. Reklasifikasi Masuk senilai Rp1.189.574.000,00 berupa perubahan status pencatatan mobil lab keliling yang semula dicatat sebagai kendaraan operasional menjadi kendaraan fungsional Surat Keterangan No.PL.03.01.26A.26A5.09.22.421 tanggal 1 September 2022

Gedung dan Bangunan Rp 20.545.394.998,00

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp20.545.394.998,00 dan Rp20.335.419.932,00.

Tabel 21
Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**20.335.419.932**
Mutasi tambah:	**219.687.700**
Hibah Masuk	185.000.000
Pengembangan melalui KDP	34.687.700
Mutasi kurang:	**(9.712.634)**
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(9.712.634)
Saldo per 31 Desember 2022	**20.545.394.998**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(2.657.857.583)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**17.887.537.415**

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

1. Hibah masuk senilai Rp185.000.000,00 berupa hibah bangunan Masjid yang berasal dari Pengurus Masjid pegawai Balai Besar POM di Makassar dengan BAST No. 002/At-Taqwa/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022.
2. Pengembangan melalui KDP senilai Rp34.687.700,00 berupa pekerjaan rehab gedung perkantoran Balai Besar POM di Makassar.

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan berupa koreksi pencatatan nilai berkurang senilai Rp9.712.634,00 berupa pengembalian belanja modal gedung dan bangunan akibat adanya kelebihan bayar kontruksi renovasi BSL 2 hasil dari audit operasional inspektorat dengan setoran No. NTPN DDC382G4V7781Q3M tanggal 28 Juli 2022.

Jalan Irigasi dan Jaringan Rp 463.074.700,00

C.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp463.074.700,00 dan Rp475.088.950,00. Tidak terdapat mutasi pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Tabel 22
Mutasi Jalan, Irigasi, jaringan per 31 Desember 2022

Jalan dan Jembatan	**0**
Irigasi	**0**
Jaringan	
Saldo 31 Desember 2021	475.088.950
- Mutasi Tambah	0
- Mutasi Kurang	(12.014.250)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(12.014.250)
Saldo 31 Desember 2022	463.074.700
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(110.863.504)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	352.211.196
Jumlah Total Jalan, Irigasi, dan Jaringan	**463.074.700**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	**(110.863.504)**
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**352.211.196**

Mutasi kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa koreksi pencatatan nilai berkurang senilai Rp12.014.250,00 berupa pengembalian belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan akibat adanya kelebihan bayar hasil dari audit operasional inspektorat dengan rincian setoran NTPN sebagai berikut:

No	Uraian	No. NTPN	Tanggal Setor	Nilai
1	Pengembalian belanja modal temuan audit operasional	9CC297QLU6FF6T8S	23-Mei-22	8.954.000
4	Pengembalian Temuan AO an.PT.Nirha Jaya	184980N9VIE5QNQ0	17-Nov-22	3.060.250
	Total Pengembalian			**12.014.250**

Aset Tetap Lainnya Rp309.830.100,00

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp309.830.100,00 dan Rp309.830.100,00. Aset Tetap Lainnya terdiri atas Monografi senilai Rp241.162.100,00 dan Buku Lainnya senilai Rp68.668.000,00. Adapun rincian mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 23
Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**309.830.100**
Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 31 Desember 2022	**309.830.100**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**309.830.100**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp62.411.505.779,00

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp62.411.505.779,00 dan Rp54.551.118.669,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	37.457.820.000		37.457.820.000
2	Peralatan dan Mesin	89.432.103.947	59.642.784.692	29.789.319.255
3	Gedung dan Bangunan	20.545.394.998	2.657.857.583	17.887.537.415
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	463.074.700	110.863.504	352.211.196
5	Aset Tetap Lainnya	309.830.100	0	309.830.100
Jumlah		**148.208.223.745**	**62.411.505.779**	**85.796.717.966**

Aset Lainnya Rp2.062.500,00

C.3 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp2.062.500,00 dan Rp26.998.300,00.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud Rp5.500.000,00

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp5.500.000,00 dan Rp5.500.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Besar POM di Makassar berupa software berbasis web bernama “ADA JA” yang digunakan untuk pemantauan keberadaan pegawai ketika melakukan perjalanan dinas luar kota. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 25
Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022
(Dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**5.500.000**
Mutasi Tambah :	-
Mutasi Kurang :	-
Penghentian Aset dari Penggunaan	
Saldo per 31 Desember 2022	**5.500.000**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(3.437.500)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**2.062.500**

Aset Lain-lain Rp. 471.216.000,00

C.3.2 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp471.216.000,00 dan Rp471.216.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Mutasi Aset Lain- Lain per 31 Desember 2022

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**471.216.000**
Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 31 Desember 2022	**471.216.000**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(471.216.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	**0**

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp474.653.500,00

C.3.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp474.653.500,00 dan Rp449.717.700,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	5.500.000	3.437.500	2.062.500
Aset Lain-lain	471.216.000	471.216.000	0
Jumlah	**476.716.000**	**474.653.500**	**2.062.500**

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban jangka pendek Rp92.902.066,00

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka pendek Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp92.902.066,00 dan Rp82.337.676,00.

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp92.902.066,00

C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp92.902.066,00 dan Rp82.337.676,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai Besar POM di Makassar per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021
-Belanja Barang YMH Dibayar	Rp 92.902.066,00	Rp 82.337.676,00
	Rp 92.902.066,00	Rp 82.337.676,00

- Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar senilai Rp92.194.982,00 terdiri atas:

No	Uraian	2022
1	Langganan Listrik Desember 2022	Rp 84.951.918,00
2	Langganan PDAM Desember 2022	Rp 4.794.410,00
3	Langganan Telpon Desember 2022	Rp 2.448.654,00
	Total Pengembalian	Rp 92.194.982,00

Ekuitas Rp92.048.820.604,00

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp92.048.820.604,00 dan Rp88.740.310.762,00 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak Rp692.962.496,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp692.962.496,00 dan Rp4.394.960,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 29
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	671.475.000	0	100,00%
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	21.487.496	4.394.960	488,91%
Jumlah	**692.962.496**	**4.394.960**	**15767,21%**

Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp671.475.000,00 sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 dan Pendapatan Denda Keterlambatan sebesar Rp21.487.496,00 yang terdiri atas:

No	Uraian	No. NTPN/SP2D	Tanggal Setor	Nilai
1	Denda Keterlambatan pengadaan Baju Dinas	221361301011505	20-Jul-22	120.870
2	Denda Keterlambatan pengadaan Perlengkapan Peserta Kegiatan KIE	221361302008154	27-Jul-22	874.500
3	Denda Keterlambatan pengadaan Perlengkapan Peserta Kegiatan KIE	221361302008314	01-Agu-22	4.164.144
4	Denda Keterlambatan pengadaan Baju Dinas	221361301015217	14-Sep-22	2.826.620
5	Denda Keterlambatan Pengadaan Reagen dan Media Mikro	221361302014821	09-Des-22	260.640
6	Denda Keterlambatan Temuan AO 2022 (Pengadaan BSL 2 PT. Prima Focus)	27A852G4V714OUDS	23-Mei-22	13.240.722
	Total Pendapatan			**21.487.496**

Beban Pegawai Rp 19.681.584.527,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp19.681.584.527,00 dan Rp18.376.594.763,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri

Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 30
Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	9.201.155.464	9.293.604.301	-0,99%
Beban Lembur	55.393.000	62.068.000	-10,75%
Beban Tunjangan Khusus	10.425.036.063	9.020.922.462	15,57%
Jumlah	**19.681.584.527**	**18.376.594.763**	**7,10%**

Beban Persediaan Rp2.553.912.527,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.553.912.527,00 dan Rp3.177.482.744,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	866.436.482	1.412.612.448	-38,66%
Beban Persediaan Bahan Baku	1.687.476.045	1.764.870.296	-4,39%
Jumlah	**2.553.912.527**	**3.177.482.744**	**-19,62%**

Beban Barang dan Jasa Rp8.844.550.833,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8.844.550.833,00 dan Rp8,019,024,730,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada *31 Desember 2022 dan 2021*
(Dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.909.744.382	1.799.723.545	6,11%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	240.020.755	228.016.910	5,26%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	21.291.738	19.581.800	8,73%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	202.340.000	197.064.000	2,68%
Beban Barang Operasional Lainnya	22.454.480	2.855.600	100,00%
Beban Barang Operasional - Penanganan Par	235.535.218	131.911.132	78,56%
Beban Bahan	2.033.981.132	1.444.608.610	40,80%
Beban Honor Output Kegiatan	541.342.500	488.696.250	10,77%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	365.713.689	474.542.242	-22,93%
Beban Barang Non Operasional - Penanganan	26.099.770	356.899.000	-92,69%
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	46.813.472	0	-100,00%
Beban Langganan Listrik	967.277.342	915.677.229	5,64%
Beban Langganan Telepon	29.672.080	29.565.789	0,36%
Beban Langganan Air	36.589.050	40.338.020	-9,29%
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	115.434.581	113.500.000	1,70%
Beban Sewa	442.283.655	314.399.617	40,68%
Beban Jasa Profesi	636.650.000	409.750.000	55,38%
Beban Jasa Lainnya	952.884.599	982.829.761	-3,05%
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	16.582.390	69.065.225	-75,99%
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mes	1.840.000	0	-100,00%
Jumlah	8.844.550.833	8.019.024.730	10,29%

Beban Pemeliharaan Rp2.086.073.802,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.086.073.802,00 dan Rp3.500.299.721,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan disebabkan oleh menurunnya beban untuk pemeliharaan belanja Modal Peralatan dan Mesin diikuti oleh penurunan beban untuk pemeliharaan dan beban persediaan suku cadang. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	351.824.902	392.578.709	-10,38%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	887.898.836	715.077.296	24,17%
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	33.549.222	77.058.684	-56,46%
Beban Persediaan Suku Cadang	812.800.842	2.315.585.032	-64,90%
Jumlah	**2.086.073.802**	**3.500.299.721**	**-40,40%**

Beban Perjalanan Dinas Rp10.208.029.702 ,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp10.208.029.702,00 dan Rp5.881.823.998,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas paket meeting dalam yang meningkat untuk mendukung tupoksi Balai Besar POM di Makassar. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021
(Dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	5.126.375.798	3.748.705.677	36,75
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.951.250.000	536.890.000	449,69
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	849.022.933	1.281.294.998	-33,74
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	1.800.000	17.100.000	-89,47
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.279.580.971	297.833.323	329,63
Jumlah	**10.208.029.702**	**5.881.823.998**	**73,55**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp7.887.396.661,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.887.396.661,00 dan Rp6.265.748.013,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.344.557.771	5.707.515.159	28,68%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	504.371.193	497.016.874	1,48%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	13.531.897	12.719.380	6,39%
Jumlah Penyusutan	**7.862.460.861**	**6.217.251.413**	**26,46%**
Beban Amortisasi Software	1.375.000	1.375.000	0,00%
Beban Penyusutan aset lain-lain	23.560.800	47.121.600	-50,00%
Jumlah Amortisasi	**24.935.800**	**48.496.600**	**-48,58%**
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**7.887.396.661**	**6.265.748.013**	**25,88%**

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Rp135.084.949,00

D.9 Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	126.299.999	73.461.000	171,93%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	591.180.278	-100,00%
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	**126.299.999**	**(517.719.278)**	**-24,40%**
Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**43.018.707**	**22.477.781**	91,38%
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	0	100,00%
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	3.391.000	0	100,00%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	10.978.343	13.528.436	100,00%
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	3.680.000	0	100,00%
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	24.969.364	8.949.345	0,00%
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya	**34.233.757**	**72.341.082**	0,00%
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	6.610.732	0	0,00%
Beban Persediaan Rusak/Usang	27.623.025	72.341.082	0,00%
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainn	**8.784.950**	**-49.863.301**	**-117,62%**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**135.084.949**	**-567.582.579**	**-123,80%**

- Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya, terdiri dari :
  - Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp126.299.999,00 berasal dari lelang kendaraan bermotor dengan No. NTPN 058B63CIF28BN6RR tanggal setor 19 Desember 2022 dengan Risalah Lelang No. RL-1337/72/2022
  - Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp3.391.000,00 terdiri dari:

No	Uraian	No. NTPN	Tanggal Setor	Nilai
1	Pengembalin Belanja Perjalanan Dinas	8BC8B7QLU6FE3ABS	19-Mei-22	906.000
2	Pengembalian honor penguji Covid-19	7D1187QLU6FF63IC	23-Mei-22	2.465.000
3	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas	AAC0455DEN40U15V	13-Sep-22	20.000
	Total Pendapatan			3.391.000

  - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp10.978.343,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. NTPN	Tanggal Setor	Nilai
1	Pengembalian Tukin dan Uang Makan Bulan Desember 2021	E5AAC2G4V6TKUBVM	04-Apr-22	9.180.394
2	Pengembalian Tukin Okt s.d Des 2021	F31BA55DEMO8SCJL	19-Mei-22	1.623.699
3	Pengembalian Uang Makan hasil Audit Operasional inspektorat	E98D81JNFCERCP6F	23-Mei-22	174.250
	Total Pendapatan			10.978.343

- Pendapatan Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp3.680.000,00 berupa koreksi atas pendapatan KDP berupa Asesoris Alat Lab yang pada awalnya dicatat sebagai pembelian lalu dikoreksi menjadi perolehan lainnya KDP.
- Pendapatan penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp24.969.364,00 merupakan koreksi otomatis akibat penggunaan metode penilaian persediaan harga perolehan terakhir dimana terdapat perolehan persediaan beberapa kali dengan nilai perolehan yang berbeda-beda.

➢ Beban dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp34.233.757,00, terdiri dari :

- Beban Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp 6.610.732,00 merupakan koreksi otomatis akibat penggunaan metode penilaian persediaan harga perolehan terakhir dimana terdapat perolehan persediaan beberapa kali dengan nilai perolehan yang berbeda-beda.
- Beban Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp27.623.025,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp 88.740.310.762,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp88.740.310.762,00 dan Rp90.084.653.698,00

Surplus/(Defisit) LO Rp (50.433.500.607,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp50.433.500.607 dan Rp45.784.015.438,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp 233.751,00

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp233.751,00 dan Rp10.190.259,00. Koreksi tersebut antara lain berupa:

Penyesuaian Nilai Aset	-
Koreksi Nilai Persediaan	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	233.751
Koreksi Lain-lain	-
Total Koreksi	**233.751**

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp10.190.259,00.

Koreksi atas Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan 0,00.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp233.751,00

E.4.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp233.751,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan akumulasi koreksi yang muncul akibat adanya koreksi pencatatan nilai bertambah ataupun nilai berkurang atas aset tetap yang dihasilkan dari Modul Aset Tetap SAKTI.

Koreksi Lain-lain Rp0,00

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas Rp53.741.776.698,00

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp53.741.776.698,00 dan Rp44.429.482.243,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 37
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	53.605.935.082
Diterima dari Entitas Lain	(855.358.722)
Transfer Keluar	
Transfer Masuk	57.568.058
Pengesahan Hibah Langsung	933.632.280
Jumlah	**53.741.776.698**

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar (Rp855.358.722,00) sedangkan DKEL sebesar Rp53.605.935.082,00.

Rincian DDEL dan DKEL sebagai berikut :

Tabel 38
Rincian DDEL dan DKEL per 31 Desember 2022
(Dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain terdiri dari	
Realisasi Belanja Pegawai	19.680.877.443
Realisasi Belanja Barang	23.931.035.467
Realisasi Belanja Modal	9.994.022.172
Jumlah DKEL	**53.605.935.082**
Di terima dari Entitas Lain terdiri dari	
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	671.475.000
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	8.246.774
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	126.299.999
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	10.978.343
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	3.391.000
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	34.967.606
Jumlah DDEL	**855.358.722**

Transfer Masuk Rp57.568.058,00

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp57.568.058,00 yang merupakan transfer masuk bahan baku dari PPPOMN.

Pengesahan Hibah Langsung Rp933.632.280,00

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp933.632.280,00 yang terdiri atas:

Pemberi Hibah	Uraian	No. BAST	Tanggal	Total
JICA	Mesin Multi Unit Extraction	NPB/024/JIC-BPOM/2022	04-Mar-22	748.632.280
Organisasi Lainnya	Bangunan Masjid	002/At-Taqwa/X/2022	21-Okt-22	185.000.000
Jumlah				**933.632.280**

Ekuitas Akhir Rp92.048.820.604,00

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masingg sebesar Rp92.048.820.604,00 dan Rp88.740.310.762,00

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.1.1. Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Makassar No. HK.02.02.26A.26A5.01.22.44 tanggal 06 Januari 2022 telah ditetapkan Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM yang diserahkan kepada Rita Sahari, SE, Bendahara Pengeluaran yang diserahkan kepada Amiruddin dan Pejabat Pembuat Komitmen yang diserahkan kepada Hamdana, S.Si, Yayu Sulistia, S.Si, Apt dan Tri Astuty, ST.

F.1.2. Berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas No: KP.07.01.1.2.08.22.90 tanggal 25 Agustus 2022, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menunjuk Dra. Sriyani Rasyid, Apt sebagai Plt. Kepala Balai Besar POM di Makassar terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2022 menggantikan Kepala Balai sebelumnya yang dijabat oleh Dra. Hardaningsih, Apt, MHSM

F.1.3. ALAT GELAS KUALITATIF

Persediaan alat gelas kualitatif merupakan alat gelas yang masih berada di gudang dan/atau alat gelas yang berada di laboratorim namun belum digunakan sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Alat gelas kualitatif yang telah digunakan pada laboratorium, dilakukan pencatatan manajerial secara manual. Jumlah persediaan alat gelas kualitatif dengan kondisi baik pada Balai Besar POM Makassar per 31 Desember 2022 adalah sejumlah 17.715 unit, adapun rincian Alat Gelas Terlampir pada Lampiran 3 Daftar Alat Gelas Kualitatif.

Adapun Persediaan Balai Besar POM Makassar dalam kondisi rusak/usang per per 31 Desember 2022 sejumlah 18 unit senilai Rp29.442.425,00

F.1.4. BARANG BUKTI

Dalam melaksanakan fungsinya, Balai Besar POM Makassar melakukan proses penyidikan di bidang Obat dan Makanan (penindakan) mengacu pada KUHAP, dalam hal ini barang bukti disita dari pemilik/penguasa barang untuk selanjutnya digunakan dalam pembuktian sesuai dalam

pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014. Barang-barang yang dilakukan penyitaan sebagai barang bukti, merupakan barang yang diduga secara langsung maupun tidak langsung terkait tindak pidana yang sedang ditangani sehingga akan dapat memberikan petunjuk (menggambarkan) tindak pidana yang terjadi.

Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh PPNS untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Barang sitaan dalam perkara tindak pidana obat dan makanan yang masih berada di Balai Besar POM Makassar pada tanggal per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

NO	proses	OBAT	OBAT TRADISIONAL	KOSMETIK	PANGAN	MESIN/ALAT PRODUKSI	Lain-Lain
1	Proses SPDP/SPDP						
2	Tahap 1						
3	P-18/P-19						
4	P-21						
5	Tahap 2						
6	SP3	4.000					
TOTAL (pcs)		4.000	0	0	0	0	0

Lokasi penyimpanan barang bukti disimpan di Kantor Balai Besar POM di Makassar pada Gudang Barang Bukti Bidang Penindakan untuk perkara yang statusnya Proses SPDP sampai dengan P-21. Sedangkan pada perkara yang sampai Tahap 2, barang buktinya sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan.

Makassar, 02 Mei 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
Plt. Kepala Balai Besar POM
di Makassar,

Dra. Sriyani Rasyid, Apt
NIP. 196710051998032001

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

1500533 HALOBPOM
0852-11111-533
bpom.mks
bpom.makassar
makassar.pom.go.id
@BBPOM_Makassar